

LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Untuk Kasubdin Taman:

1. Kondisi RTH di DKI Jakarta saat ini:
 - Jumlah
 - Keadaan RTH
 - Bentuk RTH
2. Penyebab Pemda gencar melaksanakan refungsi RTH akhir-akhir ini:
 - Isu global warming
 - KTT di Bali
 - Hal lain yang mendasari
3. Penyebab Dinas Pertamanan akhirnya merefungsi Taman Ayodia.
4. Proses implementasi:
 - Terkait dengan konsepsi Edwards:
 - a. Apakah ada sosialisasi, bentuknya apa?
 - b. Komunikasi internal bagaimana? Ada masalah komunikasi/tidak?
 - c. Sumber daya: kualitas SDM, jumlah SDM, anggaran?
 - d. Disposisi bagaimana?
 - e. Struktur birokrasi: ada SOP/tidak, ada hambatan dalam struktur birokrasi?
 - Terkait dengan konsepsi Grindle:
 - a. Kepentingan pedagang diakomodasi/tidak, apa ada kepentinganlain yang menghambat implementasi?

- b. Ada manfaat/tidak bagi para pedagang?
5. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini:
6. Kendala yang timbul dalam implementasi kebijakan:
- Protes dari pedagang.
 - Kendala dari internal

Pedoman Wawancara Untuk Kasubag Kepegawaian:

1. Bagaimana kondisi SDM di Dinas Pertamanan?
2. Kualitasnya dari segi pendidikan?
3. Masalah yang ada pada SDM?
4. Cara mengatasi masalah SDM?

Pedoman Wawancara Untuk Anggota LSM yang terkait:

1. Tanggapan mengenai refungsi Taman Ayodia, Barito menjadi RTH.
2. Proses implementasi kebijakan relokasi telah dilaksanakan dengan baik:
 - Ada resistensi, mengapa?
 - Sosialisasi, sejak kapan?
3. Apakah partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan ini:
 - Ada dialog/tidak
4. Sosialisasi dari Pemda, bentuknya melalui apa?

Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat/ Pedagang di Barito:

1. Tanggapan mengenai refungsi Taman Ayodia, Barito menjadi RTH.
2. Tanggapan mengenai relokasi dan penggusuran.
3. Mengapa ada resistensi, padahal telah ada sosialisasi.
4. Sosialisasi:
 - Ada/tidak
 - Sejak kapan.
 - Bentuknya apa
5. Ada dialog atau tidak, partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan ini.
6. Apakah menurut anda relokasi ini sudah dilaksanakan dengan baik?
7. Harapan anda untuk tempat baru yang telah disediakan?

LAMPIRAN 2: TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Dwi, Kasudin Taman Dinas Pertamanan Pemprov DKI Jakarta

Jumat, 30 Mei 2008 di Kantor Dinas Pertamanan.

Q: Bagaimana kondisi RTH di DKI Jakarta saat ini?

A: RTH di Jakarta itu sampai tahun 2010 harus mencapai 13,94% atau 14% ya, sementara yang sekarang itu baru mencapai 9,4% sampai 10% lah ya. Jadi masih kurang 4%. Nah diantara yang 10% ini masih banyak yang belum sesuai dengan fungsinya. Dalam arti kata masih banyak tempat seperti Barito, SPBU yang masih dipergunakan oleh beberapa unit, yang di dalamnya ada kesepakatan atau ijin-ijin prinsip sehingga mereka bisa menempati tempat tersebut. Mereka menempati taman karena tempat yang paling mungkin dan paling mudah untuk menampung banyak orang adalah taman atau jalur hijau. Yang menempati tempat-tempat tersebut biasanya adalah pedagang kaki lima, tunawisma.

Q: Penyebab Pemda gencar melaksanakan refungsi RTH akhir-akhir ini?

A: Ada isu *global warming*, pencemaran lingkungan, dan semakin sulitnya orang mendapatkan tempat beraktivitas di ruang terbuka. Mengapa kita tidak mengembangkan kosep RTH menjadi sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat luas. Kebijakan ini diambil ada landasan hukumnya, ada payung hukumnya, untuk implementasinya ada kajiannya, tidak hanya berdasar payung hukum. Ada wacana, ada kebutuhan, kita kan terdesak harus memperluas RTH menjadi 30 %.

Q: Dalam pengaturan guna lahan apakah sudah dikaji dengan baik, Pak?

Dalam pengaturan guna lahan, didasarkan pada perundangan yang berlaku, yang kemudian akan disusun bersama dengan para perencana kota, ahli lansekap, dan pemerintah tentunya. Saat ini kedudukan RTH dalam RTRW jelas ada.

Q: Mengapa baru sekarang, Pak, direfungsinya?

A: Taman barito ingin dibuat untuk kepentingan publik. Kita beri peringatan pada pedagang daripada dibongkarpaksa lebih baik bongkar sendiri. Awalnya ya mereka tidak mau, akhirnya terjadi tarik ulur yang membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun. Pertama kali terbersit tahun 2002, lalu tahun 2004 baru kita benar ingin merefungsikan dan akhirnya baru terlaksana tahun 2008 ini.

Q: Apakah alasan Dinas Pertamanan merefungsi Taman Ayodia?

A: Dilihat dari latar belakangnya, Jakarta Selatan itu sebenarnya adalah kota taman. Dulu kebayoran baru ini adalah kota satelit untuk daerah menteng dan sekitarnya. Sebagai daerah penyanggah yang nyaman untuk dihuni. Akan tetapi keadaan sekarang berbeda, sudah banyak mal, restoran yang mengurangi lahan hijau di Jakarta Selatan ini. Terutama dengan Taman Ayodia, taman ini berfungsi juga sebagai daerah resapan air agar bebas banjir dan sebagai taman untuk kepentingan masyarakat luas. Tetapi karena adanya pedagang di tempat itu, taman tidak dapat berfungsi maksimal.

Kebijakan untuk merefungsi Taman Ayodia ini diambil karena pedagang berdiri di ruang terbuka hijau, setelah ditinjau maka diambil keputusan untuk kembali menjadi fungsinya semula sebagai RTH. Mereka itu bukan lagi PKL tapi pedagang yang boleh dibilang kuat. Kita lihat dari data-data ekonomi dari lurah dan camat, omset mereka itu tidak kecil. Melihat hal itu dan dengan pertimbangan lain, di Jakarta ini sulit mencari lahan. Kenapa tidak lahan-lahan yang kita pinjamkan itu tidak kita kembalikan ke fungsinya semula.

Refungsi ini dicanangkan karena: Satu, sulit sekali membebaskan lahan, walaupun mau mereka tidak mau dibayar dengan harga NGOP, harga terendah, maunya dengan harga pasar. Memang di Jakarta ini masih banyak lahan kosong, tapi lahan itu bukan milik Pemda. Sekarang coba dilihat mba, Jakarta ini luasnya 650 km², satu persennya saja adalah 650 hektar. Bayangkan Monas saja luasnya 110 hektar, jadi 4% adalah kurang lebih 24 kalinya monas, pemerintah punya uang darimana. Sedangkan kepentingan lain yang lebih mendesak ada, seperti kesehatan, pendidikan. Sedangkan untuk taman buat apa bebasin tanah kalau menyedot dana sebegitu besar. Oleh karena itu kami mengambil kebijakan utama adalah merefungsionalisasi asset pemda yang selama ini dipinjamkan. Jadi tidak hanya PKL tapi juga SPBU. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi semula taman bagi khalayak ramai, terutama bagi masyarakat kalangan bawah.

Q: Bagaimana pendapat Bapak menyikapi pedagang, yang berkata bahwa mereka telah lama menetap di barito?

Dalam proses itu memang ada argumentasi. Ada yang mengeluh sudah puluhan tahun menetap ada yang beli tempatnya mahal. Itu yang salah. Kan mereka tidak punya hak milik akan tanah ini, tapi kok diperjualbelikan. Tentunya ada oknum-oknum. Saya juga tegaskan kembali bahwa telah jelas penempatan di Barito ini adalah sementara dan untuk PKL. PKL itu adalah pedagang kecil, mereka ini omsetnya dari pedagang yang paling kecil saja, pedagang ikan, bunga bisa 5 juta sebulan, nett. Apalagi pedagang yang besar. Ini kan sudah tidak termasuk PKL

lagi. Di Barito itu padahal sudah ada palangnya mba, tertulis penempatan sementara pedagang kaki lima.

Q: Siapa saja yang terkait dalam implementasi kebijakan ini, Pak, kerjasamanya bagaimana?

A: Kerjasamanya begini, pertama sosialisasi yang melibatkan walikota, camat, lurah, ukm, dinas pertamanan, dan dinas terkait lainnya. Disitu dibicarakan mengenai isi, tujuan dari implementasi kebijakan, secara internal, agar seluruh instansi terkait mengetahui perihal kebijakan dengan jelas.

Q: Apakah ada hambatan dalam komunikasi antar unit?

A: Pada kenyataannya, kita mencoba mengorganisirnya agar rencana itu dapat terlaksana ternyata agak sulit. Bukan karena komunikasi yang sulit, namun karena ada tugas dan wewenang dari unit-unit itu yang berbeda.

Q: Apakah ada sosialisasi Pak, bentuknya apa?

A: Pertama sosialisasi yang melibatkan walikota, camat, lurah, ukm, dinas pertamanan, dan dinas terkait lainnya. Tapi yang memberikan sosialisasi dan sebagainya itu Tramtib karena hanya dia yang punya kewenangan untuk memberikan tempo atau waktu bagi pedagang tersebut. Peringatan pertama dan kedua sudah diberikan. Sosialisasi saya lakukan langsung datang ke Barito pertama kali, yang kedua di Taman Langsung kita coba lagi berdiskusi dengan mereka, akan tetapi yang ketiga kali para pedagang tidak ada yang mau datang lagi karena surat mereka yang berisi rencana tentang Jakarta flower and pet shop tidak dijawab oleh Gubernur.

Q: Bagaimana dengan SDM Pak, mencukupi atau tidak?

A: Sdmnya banyak tapi kualitasnya memang masih kurang. Kondisi sdm di Dinas Pertamanan memang menjadi kendala yang cukup serius dalam upaya melaksanakan kebijakan refungsi ini. Kurangnya tenaga-tenaga ahli dan tingkat pendidikan yang rendah juga banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun menjadi masalah yang harus segera diatasi.

Q: Anggaran bagaimana, Pak, menjadi masalah atau tidak?

A: Anggaran yang tersedia untuk pengelolaan RTH masih dirasa kurang, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembebasan lahan yang saya telah sebutkan sebelumnya, menelan biaya tidak sedikit. Selain itu, kebijakan anggaran di Dinas Pertamanan itu mengacu pada skala prioritas, jadi mana yang lebih penting

didahulukan. Tidak jarang hal ini, berpengaruh pada program-program lain yang akhirnya menjadi terhambat.

Q: Tidak ada usaha kerjasama dengan swasta, Pak, seperti di New York?

A: Taman kalau sudah menyangkut kawasan yang lebih luas, banyak unit-unit didalamnya yang ikut terlibat juga. Dalam pembangunan taman tersebut kita juga memerlukan dorongan dari masyarakat juga. Seperti perusahaan swastakan banyak yang punya program CSR yang bisa membawa keuntungan buat masyarakat. Untuk lingkungan maupun kesehatan masyarakat, hal itulah yang sedang kita kejar saat ini, karena memang perusahaan swasta yang besar wajib untuk menyisihkan anggaran mereka untuk membuat program CSR ini seperti perusahaan Honda, Toyota, Daihatsu yang menyumbang ribuan pohon.

Q: Apakah ada kesulitan dalam disposisi para pegawai, Pak?

A: : Dalam birokrasi, tentunya bagaimana pimpinan dapat mengarahkan bawahannya, biasanya ada kepentingan, dulu ada unit-unit tertentu yang diuntungkan dari Barito seperti retribusi, dsb. Namun karena ada perintah dari atasan ya harus dilaksanakan. Meskipun ada tarik ulur dalam pelaksanaannya.

Q: Mengapa hal itu bisa terjadi, Pak?

A: Jadi gini mba, yang diatas itu kan uangnya banyak, sedangkan yang di bawah, kerja 24 jam, gajinya berapa sih? Akhirnya kembali lagi ke ketika ada kesempatan mereka akan ambil kesempatan itu. Karena gaji PNS itu tidak cukup, tidak seperti di Malaysia, Singapura. Tapi kesempatan kerja itu sudah tidak ada lagi, jadi orang-orang berlomba untuk jadi pegawai negeri. Pemerintah pun belum sanggup untuk memberi standar kebutuhan gaji pegawainya untuk standar hidup yang layak bagi pegawainya.

Q: Apa ada hambatan dari struktur birokrasi kita, Pak?

A: Dalam membereskan lahan kita harus bikin kajian yg butuh proses. Ada izin prinsip yang lama selesainya minimal satu bulan sampai satu bulan setengah bulan, namun karena ada kepentingan dari DPRD izin seminggu sudah keluar. Kalau sudah seperti itu, yang susah kita sebagai pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sumber daya dalam menangani hal ini sebenarnya banyak, hanya saja itulah masalah kepentingan yang susah untuk dikontrol yaitu masalah birokrasi apalagi kalau sudah menyangkut dana atau retribusi dll. Itu berhubungan dgn struktur birokrasi yang memang susah dihilangkan. Akan ada sesuatu yang hilang akibat kebijakan yg akan diambil oleh pemda ini. Ada yang merasa keberatan dengan rencana kita ini. Oleh karena itu kita berusaha untuk

mengorganisir unit-unit yang berkepentingan mulai dari unit yang terkecil. Karena memang tidak mudah untuk menjaga agar tidak ada hal yang kurang atau terlewat nantinya.

Q: Ada SOP atau tidak Pak?

A: Sesuai Perda No 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, disebutkan bahwa yang namanya jalur hijau itu tidak boleh ada bangunan apaun ataupun orang yang melintas. Lalu ada juga Instruksi Gubernur No. 36 tahun 2006. Dalam refungsi ini, ada SOP yang dibuat mengacu pada undang-undang.

Q: Apakah ada kepentingan lain dibalik refungsi ini?

A: Kepentingan yang lebih mendesak itu bebasin lahan susah kok tanah yang kita punya hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang. Hanya pedagang saja, dan konsumennya adalah orang-orang yang punya duit, oleh karena itu melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah kebijakan ini diambil karena mereka berdiri di ruang terbuka hijau, setelah ditinjau dan berulang kali diperingatkan karena mereka telah menjadi kuat maka diambil untuk kembali menjadi fungsinya semula sebagai RTH. Kebijakan ini diambil ada landasan hukumnya, ada payung hukumnya, untuk implementasinya ada kajiannya, tidak hanya berdasar payung hukum. Ada wacana, ada kebutuhan, kita kan terdesak ini harus memperluas RTH menjadi 30 % loh. Namun dalam implementasinya dilihat kepentingan masyarakat luas, penerapannya tentu bertahap.

Q: Para pedagang mengeluhkan kondisi kios yang kecil, bagaiman tanggapan Bapak?

A: Kiosnya kecil itu karena standarnya PD Pasar Jaya itu ukuran 2x2. Mereka minta diterapkan sama seperti di Barito, kalau begitu harus ambil 3 atau 4 kios agar sama besarnya. Tapi tidak bisa, karena disini asas keadilan, dan asas pemerataan berlaku. Sebelum mereka digusur, disediakanlah tempat penampungan yaitu di Radio Dalam. Itu juga sebenarnya milik PD Pasar Jaya namun karena asetnya Pemda maka sah-sah saja mereka disitu. Kita harus bisa menerapkan refungsi tersebut sesuai dengan aturan. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi semula taman bagi khalayak ramai, terutama bagi masyarakat kalangan bawah.

Q: Mengapa ada resisitensi atau bentrokan, Pak?

A: Antara pedagang dengan Pemda sebenarnya tidak bentrok. Mereka hanya tidak mendapat keterbukaan Pemda atas rencana Ruang Hijau Terbuka ini. Mereka merasa hanya Pemda saja yang mendapat keuntungan. Sementara pedagang punya

argumentasi yang cukup kuat. Selama ini kalau masyarakat ingin mencari bunga atau burung itu di Barito. Bahkan jaringan mereka pun bukan hanya di Indonesia saja melainkan sudah sampai ke ASEAN. Jika hal ini dipatenkan, maka tidak akan perlu promosi lagi. Mereka beranggapan kalau mereka harus sharing atau memberi sebagian uang untuk membangun yah mereka merasa tidak ditanggapi rencana mereka tersebut. Karena itu ada LBH, ormas masyarakat yang mengatakan Pemda tidak berpihak pada masyarakat kecil. Padahal dibalik itu mereka juga tidak memahami aturan-aturan. Pertama, merekakan diberi kesempatan oleh kita untuk berdagang. Setelah mereka kami rasa cukup kuat ya kami beri pilihan silahkan pindah saja, bangun di tempat lain jadi tempat itu bisa dipakai untuk kepentingan luas.

Wawancara dengan Bapak Winarto, Kasubag Kepegawaian Dinas Pertamanan DKI Jakarta

Jumat, 30 Mei 2008, di Dinas Pertamanan

Q: Bagaimana kondisi SDM di Dinas Pertamanan?

A: Kemampuan pegawai di Dinas Pertamanan belum maksimal, yah rata-rata saja lah. Tenaga ahli juga kekurangan dan rata-rata pegawai sudah cukup tua karena memasuki usia pension, sehingga kurang produktif dalam bekerja.

Q: Mengapa bisa begitu, Pak?

A: Penyebabnya antara lain karena jarang diadakan kegiatan pelatihan, Tingkat pendidikan para pegawai umumnya SLTA sehingga secara kurang memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya.

Q: Usaha apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya, Pak?

A: Yah salah satunya adalah dengan mengintensifkan kegiatan pelatihan dan juga perlu melakukan *outsourcing* untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli.

Wawancara dengan Pedagang Bunga Barito, Asep, 22 Tahun

Senin, 2 Juni 2008 di Pondok Indah

Q: Awal mula mulai berdagang di Barito sejak kapan?

A: Orangtua sudah mulai berdagang di Barito sejak pertengahan 80-an. Sebelumnya orangtua saya menjadi supplier bunga di Cikini, pada awal tahun 1980-an, keluarga saya mendapatkan kios di Barito yang disewa dari pemilik kiosnya di Kebun Jeruk. Keluarga saya mengetahui kalau tanah di Barito tersebut milik pemerintah, tetapi ternyata bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berjualan tentunya dengan membayar sewa kios tersebut.

Q: Berapa harga sewa kios tersebut?

A: Harganya dulu itu Rp 300.000 perbulan. Kalau sekarang sudah 3 juta perbulan. Semakin lama harganya memang semakin mahal.

Q: Berapa banyak pedagang bunga di Barito dan menurut anda apa yang menjadi keistimewaan berjualan bunga di Barito?

A: Sekarang sudah mencapai 105 pedagang bunga. Tingkat persaingan sangat tinggi sekali antara sesama penjual. Menurut saya susah dilepaskan hubungan antara pedagang bunga dengan Barito, karena sejak awal kita memang sudah berjualan disini, dan tempat ini menjadi salah satu tujuan wisata internasional bagi turis asing yang ingin membeli bunga. Sangat strategis tempatnya. Usaha ini bisa dibidang menjanjikanlah. Makanya kita keberatan ketika mendengar berita mau digusur tersebut. soalnya tempat kita ini sudah jadi objek wisata belanja.

Q: Selama rentang waktu kurang lebih 28 tahun, apakah masalah tentang penggusuran ini sudah sering terjadi?

A: Ya sebenarnya masalah penggusuran ini sudah sering kita dengar beberapa kali, tetapi kami masih bisa menyelesaikannya, pemerintah memberi tenggat waktu pada kami.

Q: Apakah orang yang pertama membangun kios di Barito dilarang pemerintah?

A: Tidak dilarang tuh. Malahan jadi bertambah banyak. Memang kita juga memberi pungutan resmi bukan gelap karena ada buktinya yang membuat kita bisa berdagang di Barito.

Q: Anda mengetahui dengan jelas alasan yang dikemukakan oleh pemerintah sehubungan dengan penggusuran ini?

A: Tidak terlalu jelas, hanya tahu bahwa mereka ingin membuat daerah Barito ini menjadi taman hijau kembali. Soalnya sosialisasi tidak ada dilakukan, tidak ada musyawarah dengan pemilik kios, mungkin hanya dengan ketua pedagang saja Akhirnya ada kompensasi yang diberikan pemerintah seperti memberikan kios di

Radio Dalam tuh tapi kita ga merasa cocok dengan tempat yang dikasi pemerintah itu. Ada di daerah Radio Dalam, Senopati, Ahmad Dahlan.

Q: Bagaimana dengan omset penjualan anda?

A: Menurun sekali.

Q: Pendapat anda mengenai kebijakan pemerintah ini?

A: Yah agak kecewalah. Pertama mereka tidak memberikan sosialisasi yang baik antar pemilik kios dengan pemerintah. Setelah itu kompensasi yang kami anggap kurang memuaskan. Meskipun pemilik kios diberi jatah di Radio Dalam, tapi saya tidak ambil karena tempatnya cuma 2x2 meter tempat itu sangat kecil sekali berbeda dengan kios saya terdahulu. Kita sadar tanah ini milik pemerintah, hanya saja ada ganti yang cocoklah. Rencana pemerintah bagus, tapi jangan merugikan masyarakat kecil seperti kita. Minimal besar kios sama dengan yang kami punya dulu di Barito lebih baik lebih bagus.

Q: Harapan kedepan Anda?

A: Yah saya harap keadaan bisa menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Keuntungan yang bagus daripada kemaren-kemaren.

Wawancara dengan Pedagang Ikan Hias Barito, Iwan, 24 Tahun

Senin, 2 Juni 2008 di Pondok Indah

Q: Bisa anda ceritakan awal mula daerah Barito menjadi pusat bunga dan ikan hias?

A: Yah awalnya memang hanya tanah kosong, tapi bisa dimanfaatkan. Awalnya menjual tanaman hias. Untuk memperindah lokasi Jakarta Selatan. Seiring berjalannya waktu mulai ada penjual rangkaian bunga, tanaman kering, ikan hias dll. Yang bunga rangkaian itu dulunya dari Cikini yang digusur, secara bertahap pedagang malah bertambah banyak. Ikan hias juga. Kita juga tahu tanah itu sebenarnya ga bisa dibuat untuk berjualan terus menerus apalagi dengan rencana pemerintah yang ingin merefungsinya menjadi taman hijau.

Q: Anda mengetahui jelas alasan pemerintah menggusur kalian para pedagang?

A: Ya Saya mengetahuinya. Pemerintah mau seluruh lahan hijau di Jakarta ini difungsikan kembali. Menurut saya penggusuran di daerah Barito ini yang paling berat. Pemerintah berpikir jika bisa menggusur kami, maka menggusur

yang lainnya akan semakin mudah. Taman Puring dan Pasar Burung hanya tinggal menunggu waktu saja untuk digusur sama seperti kami.

Q: Bagaimana anda menanggapi kejadian pengusuran ini?

A: Begini, kita ini yang berjualan di Barito bukanlah pedagang gelap. Kita ini binaan UKM Jakarta Selatan. Kalau sampai akhirnya seperti ini, digusur, yah sebenarnya kami tidak masalah untuk diminta pindah baik-baik. Tetapi Pemerintah harusnya memberikan kompensasi yang bagus juga. Gini-gini kami juga ikut menjaga kebersihan sungai lho. Bukan kami yang mencemari sungai-sungai menjadi limbah melainkan itu sisa dari zat-zat berbahaya hotel-hotel dan perkantoran daerah sekitar. Kami ingin mendapatkan tempat layak dan strategis seperti selama ini.

Q: Apakah pernah terjadi dialog antara pedagang dengan pemerintah?

A: Tidak pernah. Pemerintah itu maunya menang sendiri saja. Keputusan akhirnya pasti selalu sepihak, ya dia itu yang memutuskan. Padahal kita para pedagang punya rencana tersendiri untuk membantu pemerintah dalam merefungsi taman barito ini lho. Rencana Jakarta Flower and Pet Shop. Kita hanya akan menggunakan 1 sisi saja dari taman Barito. 1 sisi untuk taman, 1 sisi untuk kami berjualan. Saya rasa itu ide yang bagus, karena kalau bukan kami yang merawat taman tersebut siapa yang mau melakukannya? Eh ternyata ditolak.

Q: Anda merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah tersebut?

A: Adalah rasa keberatan itu sedikit. Kamikan sudah berdagang puluhan tahun di Barito. Kami tidak masalah diminta untuk pindah. Kita juga tahu diri kok. Tapi solusi yang diberikan itu sangat tidak sesuai. Kios sebesar 2x2 meter itu sangat kecil. Mau ditaruh dimana akuarium-akuarium saya? Kios kita sebelumnya lebih besar. Kalo tidak 2x5 meter, ada yang 3x3 meter. Setelah itu daerahnya tidak strategis dan rawan banjir.

Q: Ada harapan tersendiri setelah kejadian ini?

A: Harapan saya ya agar pemerintah lebih melihat ke bawahlah masih banyak orang seperti kami yang harusnya dibantu bukan ditelantarkan. Toh mereka juga dapat keuntungan kok dari pedagang-pedagang seperti kami ini.

Wawancara dengan Bapak Teddy Panji, Ketua Koordinator Pedagang di Barito

Senin, 2 Juni 2008 di Pondok Indah

Q: Bagaimana dengan tempat yang berada di Radio dalam?

A: Kita menolak untuk berada disitu. Yah yang kita perjuangkan inikan bukan untuk kepentingan pribadi saja, melainkan untuk membuktikan pada Pemda bahwa membuat relokasi tanpa kajian itu salah. Kita tidak pernah mengklaim tanah itu milik kita meskipun sudah berada disana hampir 37 tahun. Kita menawarkan solusi kepada Pemda yaitu taman Hibrida. Alasan yang dikemukakan oleh Pemda akhir-akhir inikan tentang RTH. Kita tidak meminta uang ganti rugi tapi walaupun kami tidak bisa berada disana lagi, kami minta dipindahkan dengan layak. Maksudnya layak itu ya kalau pedagang bunga dipindahkan ke tempat yang ukurannya lebih kecil hanya 2x2 meter saja itukan ga layak, kurang besar. Bagaimana dengan promosinya dan lain-lainnya. Kalau Pemda melihat kami sebagai aset daerah mereka bisa berdiskusi dengan kami, mencari win-win solution. Nah ini yang tidak pernah didengarkan oleh Pemda. Ketika kami mengajukan proposal yang sudah kami rancang dari zaman Sutiyoso, mereka tidak menerimanya. Padahal kami mencoba mengkonsultasikan dengan ahli-ahli pada RTH yang menurut mereka harusnya bisa. Kami menawarkan rancangan itu tanpa harus membuat Pemda mengeluarkan uang sepeserpun. Tapi hal ini yang tidak dilihat oleh Pemda.

Q: Apa ada sosialisasi dari Pemda, koordinasinya bagaimana?

A: Sekarang kita bicara fakta saja. Asal muasal kita mau dipindahkan karena pasca kebakaran, tidak ada menyangkut RTH. Di putusan 2006 kita katanya mau dipindahkan atau direlokasi ke pasar Santa pasca kebakaran. Akhir Juli 2006 rencananya kita mau dipindahkan. Tapi kita aman, karena ada acara Barito Day yang menjadi acara unggulan. Nah mulai lagi gonjang-ganjing pada tahun 2007. Saya menangkap keanehan-keanehan dalam Pemda. Biasanya surat ijin usaha kita kan selalu ditandatangani oleh Gubernur, kita masuk lagi, bahwa kita boleh berdagang. Tapi surat itu tidak dikeluarkan malah ditahan oleh Dinas Pertamanan, mereka tidak mengeluarkan surat ijin usaha. Yang anehnya juga tahun 2006 itu Sutiyoso juga yang menandatangani surat agar kita pindah ke pasar Santa. Tapi tahun 2007 malah setuju agar kita di Barito. Konsistensinya itu tidak ada. Kitapun selalu dibilang kalau kita itu dibilang jorok, mencemarkan sungai menjadi tidak bening lagi. Kita coba bawa sampel air tersebut ke laboratorium, hasilnya bukan kami yang membuat sungai tersebut menjadi kotor, melainkan limbah dari hotel2. Kita ingin tahu kenapa kita selalu dikambinghitamkan, kenapa kita mau digusur.

Disini udah jelas. Tapi ga ada tanggapan. Kita coba membuat kompos dari hasil buangan bunga. Malah kita mendapatkan penghargaan dari BPPT tahun 2007. Anehnya, 3 hari setelah penghargaan ini, yang ngasi penghargaan itu atas nama walikota, bicara di TV bilang kalau Barito itu jorok. Lho kok orang yang mengeluarkan penghargaan itu bisa mengatakan hal yang terbalik seperti ini, sangat aneh.

Apa yang membuat ada resistensi dari pedagang, Pak?

Kita inikan bukan liar. Ada SK Gubernur yang tiap tahun diperbaharui. Kita adalah kaki lima resmi. Kitakan bisa diajak berdiskusi. Selama ini 37 tahun kita dibiarkan untuk berjalan sendiri. Perjuangan kita pada intinya bukan hanya uang tapi untuk kehidupan rakyat kecil. Kita bisa maju, kenapa kita ga bisa perjuangkan semua ini. Kita tidak pernah berpikiran mencari masalah dengan pemda secara ngotot. Pada saat beberapa hari sebelum d-day nya banyak orang partai yang datang mau nolongin dan sebagainya, kita sih tertawa aja sama badut-badut politik itu. Sampai sebelum digusur kita masih dimintain retribusi loh, walikotanya ditanya sama gubernur hanya diam saja, gimana komunikasinya coba?

Q: Apakah ada dialog antara Pemda dengan Pedagang sebelum pengusuran itu terjadi?

A: Tidak ada, hanya one way communication. Disaat kita tidak hadir, mereka langsung memberika SP 1, SP 1 dalam rentang waktu yang sangat cepat. Ada undangan sosialisasi. Kita diminta datang hanya untuk diminta langsung pindah, itu saja. Tidak ada diskusi. Anda bisa mempertanyakan berapa kali sosialisasi yang terjadi sebelum kami ini digusur. Hanya Desember 2007 yang diprakarsai oleh LBH dan 4 Januari 2008.

Q: Bisa dijelaskan mengenai konsep Taman Hibrida yang Bapak ajukan?

A: Taman itukan fungsinya banyak. Buat interaksi, rekreasi, sosialisasi, bahkan kami punya ide agar interaksi antara anak berhubungan dengan pendidikan ya, mereka bisa mengenal dan belajar bermacam-macam bunga dan ikan hias yang ada di barito. Jadi mereka tidak perlu belajar jauh-jauh ke Seaworld. Inikan hal yang bagus. Kita menginginkan ya ada kerjasama dengan Pemda ini. Tapi tidak bisa terwujud karena ada sesuatulah konsep kita ini ga bisa tembus. Semuanya alasan hanya mengacu pada RTH.

Q: Kenapa bertahan di Barito?

A: kita bicara mengenai hak kita. Kita tahu itu adalah tanah Pemda. Kita bertahan di Barito karena kita tidak mendapat tempat ganti yang layak, itu saja, kalau mau

dipindahkan gapapa, asal kompensasinya juga samalah bagusnya. Kita ga minta duit dari Pemda. Kita punya slogan , pindahkan kami dengan layak. Ketika kami hanya di kasi 2x2 meter itu bukan tempat yang layak.

Q: Bagaimana dengan keadaan para pedagang disini?

A: Kita disini alhamdulillah sudah mulai mandiri. Alhamdulillah dengan sistem management yang kita bangun mereka bisa menerima dengan baik. Ini yang ingin kita tunjukkan, punya nilai lebih. Ada dari BSD, Tangerang yang ingin mengajak kita untuk berjualan disana. Inikan berarti kita punya kelebihan tersendiri daripada penjual yang ada di Radio Dalam.

**Wawancara dengan Bapak Eddy, LBH Jakarta
Kamis, 5 Juni 2008, di Salemba**

Q: Apa tanggapan anda mengenai refungsi Taman Ayodia Barito menjadi RTH?

A: Kalau menurut gw, gw keberatan kalau Taman Ayodia harus direfungsikan. Pertama, keberadaan lingkungan disana tidak hanya taman saja. Ada manusia, ada bangunannya. Tapi konsep RTH dari pemerintah itu dimaknai dengan hanya ada taman, pohon. Tapi ada perkembangan ketika disebut RTH disitu ada elemen-elemen yang menunjang lingkungan. Kalau kita merujuk kepada undang-undang 23 tahun 1997, yang berbicara mengenai elemen lingkungan hidup itu bukan hanya taman dan pohon melainkan ada ruang, ada manusia juga. Hal ini yang tidak disadari oleh pemerintah.

Kedua, kenapa baru sekarang mau dilakukan refungsi? Kenapa ada kebijakan dulu taman itu bisa digunakan oleh pedagang samapi 37 tahun lamanya?

Ketiga, tawaran pemerintah terhadap refungsi taman ini, hanya memikirkan taman saja. Tapi elemennya yaitu pedagang dilupakan. Sehingga dia harus direlokasi ke daerah yang kurang tepat. Menurut saya ya kurang tepat saja berbicara mengenai refungsi Taman Ayodia ini.

Selain itu yang Keempat, kalau kita lihat di Google Earth, disekelilingnya itu banyak taman. Yang kita tentang, kalau RTH itu untuk membuat agar bebas banjir, jangan difokuskan kepada 1 titik saja. Tapi harus berbagi. Sedangkan ini di Jakarta Selatan hanya difokuskan pada taman Ayodia ini saja. Nah inikan tidak benar, padahal di daerah lain masih ada bangunan-bangunannya. Ini ada ketidakseimbangan.

Q: Bagaimana dengan peran pemerintah dalam implementasi kebijakan refungsi RTH di Taman Ayodia?

A: Secara hukum, Pemda memang berhak atas tanah di Taman Ayodia itu. Tapi ada kewajiban hukum juga bagi pemerintah ketika memindahkan pedagang itu, ada kewajibannya. Pertama, jangan sampai terjadi degradasi ekonomi pada

pedagang, tertulis jelas dalam undang-undang 11 tahun 2005 ttg konvensi hak ekosos. Kalau sebelumnya kios yang mereka punya ukurannya 4x4 meter, jangan menjadi 2x2 meter nah itu jelas ada degradasi. Pemerintah boleh berbuat tapi pemerintah ada kewajiban, harus seimbang..

Q: Bagaimana dengan masalah sosialisasi antara Pemda dengan Pedagang?

A: Sosialisasi sudah ada, saya akui. Tapi itu tawaran inisiatif dari pedagang dan pendampingnya seperti kita. Sebelumnya tidak ada. Inisiatif pertemuan dari kita itu malah dijadikan sebagai skenario mereka sekanan-akan mereka yang punya inisiatif untuk berbicara dengan kami. Pemerintah tidak pernah bersosialisasi langsung dengan pedagang. Padahal, mestinya kritik pedagang itu dikumpulkan, mereka datang tokonya pedagang 1persatu begitu minimal ada sosialisasikan. Konsep LBH kan duduk bareng, cari kata mufakat, win-win solution yang bagus begitu. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah itu berbentuk Surat Peringatan.

Q: Berarti bentuk sosialisasi dari Pemda itu hanya sebatas SP?

A: Ya. Dan inisiatif pertemuan dari kita itu, dipakai pemerintah untuk sosialisasi, menjadi laporan ke gubernur. Anehkan? Kita nyuratin ke gubernur, setelah itu ketemu walikota. pas Sama walkot jaksel, itu dipakai buat sosialisasi ke kita. Padahal kita maunya duduk bareng, untuk ngomongin ni tawaran kita. Yang diadain di Taman Langsat. (Kita nyuratin ke Gubernur, Gubernur Disposisi, ke walikota Jaksel, sama mereka direschedule kembali trus kita diundanglah untuk membuat sekan-akan mereka yang punya inisiatif!

Q: Koordinasi dari pemerintah sendiri bagaimana?

A: Kalo ngomong pelaksanaan refungsi, koordinasinya yang tidak ada. Tidak ada yang namanya lintas kerja sektoral antara perencana kota, pelaksana kebijakan, dan instansi terkait. Masing-masing bicara beda-beda, sangat disayangkan karena hal tersebut membuat mereka terlihat tidak serius dalam pelaksanaan. Nah itu yang paling menarik. Dari setiap dinas berbeda-beda. Satpol PP maunya gusur, karena mereka dapat duit dari proyek penggusuran itu. Dari Dinas UKM, ini saya sayangkan kerena mereka tidak mengambil peranan didalam usahanya membantu pedagang, padahal kan pedagang binaannya UKM. Trus Dinas pertamanan, maunya gusur aja. Kritiknya kami, harusnya ini lintas sektoral, bukan Dinas Pertamanan saja. Disana ada Dinas UKM ya dikutsertakan dong termasuk didalamnya para pedagang.

Q: Adakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini?

A: Tidak ada partisipasi masyarakat, itu yang salah dalam implementasi kebijakan ini. Padahal pedagang itukan unsur yang penting dalam kebijakan refungsi ini. Mereka sudah berada ditempat tersebut selama 37 tahun. Intinya tidak ada lintas kerja sektoral antara perencana kota, pelaksana kebijakan, dengan instansi terkait yang ada hubungannya dengan Taman Ayodia tersebut.

Q: Kalau dari segi pandangan para pedagang sendiri, apa pendapat mereka?

A: Ya sebenarnya mereka tidak masalah apabila mereka dipindahkan. Hanya saja tempat yang diberikan pemerintah itu kurang layak. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ukuran kios mereka sebelumnya 2x2 meter. Di kios sekecil itu bunga-bunga berukuran besar pada mau ditaruh dimana? belum lagi pedagang akuariumnya. Tempat yang disediakan di Radio Dalam itu kurang memenuhi kebutuhan mereka. Ya itu masalah pilihan pedaganglah. Ini juga yang bikin akhirnya mereka tidak solid lagi karena kalau sudah bicara mengenai pilihan hidup tidak semua orang punya pilihan dan pendapat yang sama. Mereka yang di Radio Dalam tidak punya pilihan. Kalau ada yang lebih baik mereka pasti milih yang baik. Namanya rakyat kecil ya udah disediakan tempat meski kurang layak ya tetap aja diambil. Nyari duitkan susah sekarang. Kalo dikasi pilihan, gw yakin warga sebodoh apapun pasti akan memilih yang lebih enak.

Q: Menurut anda adakah kepentingan lain dibalik refungsi RTH ini?

A: Saya tidak tahu dan saya berharap tidak akan ada udang dibalik batu perbuatan pemerintah ini, kalau mau dibikin taman ya bikin taman. Karena kalau ternyata taman itu berubah fungsi menjadi sesuatu bangunan, kita akan naik lagi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dameria Febriyani Panjaitan
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Februari 1985
Alamat : Jl. Raya Tengah No. 8 RT 06/03, Gedong, Pasar
Rebo, Jakarta Timur
Nomor Telepon : 021-8403275
E-Mail : red_light09@yahoo.com
Nama Orang Tua Ayah : Simon H Panjaitan S.Sos
Ibu : Ir. Linda Mulyani

Riwayat Pendidikan Formal:

SD : SD Batang Hari Jakarta Pusat
SLTP : SLTP Sumbangsih Ampera
SMU : SMUN 28 Jakarta Selatan
D-3 : D3 Penyiaran FISIP UI

Prestasi:

2004 : Pemenang *Global Tv Indie Film Festival* kategori *Best Film, Best Scereenwriting, & Finalist of Hellofest volume 2* untuk Film Pendek '*Absurd*'.

2004 : Juara 2 Kompetisi Liga Basket Mahasiswa tahun 2006

2006 : Finalis KONFIDEN 2006 untuk Film Pendek '*The Six Million Dollar Man Corrupted*'

2006 : Peraih Medali Perak Futsal Putri Kontingen FISIP UI pada Olimpiade UI 2006

2007 : Peraih Medali Emas Futsal Putri Kontingen FISIP UI pada Olimpiade UI 2007

2007 : Finalis Pemilihan Abang None Jakarta Barat Tahun 2007

2008 : Juara 2 Kompetisi Futsal FIB CUP 2008